



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) perlu dilakukan perbaikan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

- Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 Oktober 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 30 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 62

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 62 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI
 BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023

No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target					Jumlah Anggaran					Unit/Satuan Kerja Pelaksana			
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Koordinator	Pelaksana		
Sasaran Strategis I : Terciptanya tata kelola pemerintah digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel																				
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi / Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile	Persentase Penyederhanaan Birokrasi/Struktur Organisasi Perangkat Daerah	100	Melaksanakan Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah dan Penyetaraan Jabatan	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang selesai dilaksanakan penyederhanaan birokrasi	21					21	50,000,000					50,000,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
					Jabatan	Jumlah Jabatan yang selesai dilakukan Penyetaraan Jabatan Fungsional	244					244	50,000,000					50,000,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Modal Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	50	Percepatan Implementasi Mekanisme Kerja	Dokumen	Jumlah Dokumen Pedoman Mekanisme Kerja yang Disusun			1			1		15,000,000			15,000,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,44	Menyusun dokumen arsitektur SPBE	Dokumen	Jumlah dokumen arsitektur SPBE yang tersusun				1		1				29,995,598	29,995,598	Diskominfo	Diskominfo	
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	70 (BB)	Penguatan Implementasi SAKIP	Persentase	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen SAKIP Minimal Baik		75				75		25,000,000				25,000,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
					Persentase	Persentase Perangkat Daerah dengan penyampaian dokumen SAKIP tepat waktu	100				100	25,000,000					25,000,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	
					Peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah	Jumlah Sosialisasi/ Bimtek yang dilaksanakan			1		1				20,000,000		20,000,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
					Percepatan perbaikan Implementasi SAKIP	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	3	1	4	2	10				25,000,000		25,000,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
5	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	70	Pendampingan dan penilaian Zona Integritas terhadap 2 OPD	Nilai	Rata-rata Capaian Nilai Zona Integritas				70		70	16,500,500	16,500,500	16,500,500	16,500,500	66,002,000	Inspektorat	Inspektorat	
6	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturisasi SPIP	3	Pendampingan Pengisian SPIP	Kegiatan	Jumlah Bimtek Pemetaan Resiko yang dilaksanakan			1			1	24,999,879	24,999,879	24,999,879	24,999,882	99,999,519	Inspektorat	Inspektorat	
7	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindakanlanjutan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	100	Peningkatan penanganan aduan masyarakat yang masuk melalui kanal SP4N-LAPOR	Pengaduan	Jumlah pengaduan masyarakat yang berhasil ditindaklanjuti	10	10	10	10	40	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	48,000,000	Diskominfo	Diskominfo		
			100	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	25	25	25	25	100	225,000,000	225,000,000	225,000,000	225,000,000	900,000,000	Inspektorat	Inspektorat		

No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target					Jumlah Anggaran					Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Koordinator	Pelaksana	
8	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi/Survei Penilaian Integritas	Survei Penilaian Integritas	94	Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas	Persentase	Capaian SPI		25	30	39	94	62,495,993	62,495,993	62,495,993	62,495,993	249,983,972	Inspektorat	Inspektorat	
					Jumlah	Laporan Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas				1	1						0	Inspektorat	Inspektorat
9	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	60		Dokumen	Jumlah Dokumen Propemperda Tahun berjalan dan Tahun berikutnya birokrasi	3	3	3	3	12	20,000,000	20,000,000	20,000,000	13,666,529	73,666,529	Bagian Hukum	Bagian Hukum	
					Dokumen	Jumlah Dokumen Propemperkada Tahun berjalan dan Tahun berikutnya	15	15	15	15	60	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	70,000,000	Bagian Hukum	Bagian Hukum	
10	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	60	Alih media arsip dan penyimpanan arsip	Persentase	Persentase pelaksanaan arsip digital	15	15	15	15	60	30,000,000	40,000,000	20,000,000	26,386,567	116,386,567	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
				Peningkatan Tata Kelola Kearsipan	Dokumen	Jumlah Dokumen Tatakelola Kearsipan yang disusun				1		1	20,000,000	20,000,000	20,000,000	11,017,187	71,017,187	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
11	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	100	Menyusun dokumen rencana aksi satu data	Dokumen	Jumlah dokumen rencana aksi satu data yang tersusun			1		1			300,000,000		300,000,000	Diskominfo	Diskominfo	
				Menyusun dokumen proses bisnis satu data	Dokumen	Jumlah dokumen proses bisnis satu data yang tersusun				1	1				152,588,235	152,588,235	Diskominfo	Diskominfo	
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	60	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Nilai (Max 30)	Nilai Sistem Pengadaan Secara Elektronik	19		19.96		38.96	62,950,969	62,950,969	62,950,969	62,950,969	251,803,876	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
				Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Nilai (Max 30)	Jumlah JF PPBJ Kabupaten Sambas	10.4	1.34			11.74	26,492,820	26,492,820	26,492,820	26,492,820	105,971,280	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
				Penguatan Tingkat Kematangan UKPBJ	Nilai (Max 40)	Nilai Pencapaian Level Kematangan	8.89	17.78	8.89		35.56	284,306,138	284,306,138	284,306,138	284,306,138	1,137,224,552	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
13	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran	44				44				18,000,075	18,000,075	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	
				Rekonsiliasi Keuangan dan Aset tepat waktu	Dokumen	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Per Triwulan	1	1	1	1	4	4,012,493	4,012,493	4,012,493	4,012,493	16,049,972	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tepat Waktu	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Semester I				1	1				9,999,910		9,999,910	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
				Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1				1	111,357,146					111,357,146	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD tepat waktu, dan sesuai ketentuan	Dokumen	Jumlah Laporan RKBMD yang disusun tepat waktu		1			1		147,170,326				147,170,326	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
				Penyusunan Laporan BMD sesuai SAP dan Peraturan Pengelolaan BMD	Dokumen	Jumlah Laporan BMD yang diselesaikan tepat waktu		1		1	2		75,503,000			113,255,802	188,758,802	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
				Pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase	Persentase Penyelesaian Dokumen BMD yang diusulkan	25	25	25	25	100	48,854,120	48,854,120	48,854,120	48,854,120	195,416,480	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	
				Pelaksanaan Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase	Persentase Penerbitan sertifikat	10	30	40	20	100	33,733,623	101,200,869	134,934,492	67,467,246	337,336,230	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	

No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Output		Target					Jumlah Anggaran					Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Koordinator	Pelaksana	
Sasaran Strategis 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK ASN yang Profesional																			
1	1. Penataan Jabatan Fungsional, 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN, 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, 4. Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	285	Pelantikan pejabat fungsional	Jumlah	Jumlah pejabat fungsional yang dilantik			175	413	588					0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah	
				Pelaksanaan assessment bagi jabatan pelaksana	Jumlah	Jumlah pejabat yang diassessment		85	241		326		7,650,000	21,690,000		29,340,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah	
				Pelaksanaan pemutakhiran data informasi kepegawaian ASN ke basis teknologi informasi	Jumlah	Jumlah dokumen pemutakhiran data ASN yang tersusun	250	250	250	250	1000						0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah
				Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	Indeks pengukuran IIP ASN yang tersusun		56			56						0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah
2	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	70 (B)	Sosialisasi Survei Budaya Kerja ASN	Jumlah	Jumlah Sosialisasi Pelaksanaan Survei Budaya Kerja ASN			1		1				12,000,000	12,000,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	
				Pengisian Survei Budaya Kerja ASN	Persentase	Persentase Pegawai yang mengisi Survei Budaya Kerja ASN			40		40				12,000,000	12,000,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	
				Penguatan Implementasi Budaya Kerja	Persentase	Persentase PD yang telah internalisasi budaya kerja				50	50				30,000,000	30,000,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	
6	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	3.7	Pendampingan Unit Lokus Evaluasi	Perangkat daerah	Jumlah PD yang dilakukan pembinaan			3		3			35,000,000	35,000,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi		
				Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	80	Pendampingan Unit Lokus Penilaian	Jumlah	Jumlah PD yang dilakukan pembinaan			7		7		50,000,000	50,000,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	
		Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	85	Peningkatan Kolaborasi Pengawasan dan penilaian pelayanan Publik	Dokumen	Jumlah MOU Kerjasama dengan Ombudsman			1	1				35,000,000	35,000,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi		
				Percepatan Penyusunan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Perangkat daerah	Jumlah PD dan UPTD yang menyampaikan Laporan SKM Tepat Waktu		50		50	100		20,000,000		15,000,000	35,000,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Persentase	Persentase PD yang menindaklanjuti hasil SKM				75	75				60,000,000	60,000,000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ERWANTO S.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 62 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023

No	Tema	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholders utama)	Jumlah Anggaran					Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Koordinator	Pelaksana
1	Pengentasan Kemiskinan	Masih banyaknya masyarakat kurang mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan di Kabupaten Sambas	Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Jaminan Kesehatan	110,000	Pembayaran iuran dan Bantuan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PEPUBP) yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Sambas	Orang	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Jaminan Kesehatan	27,500	27,500	27,500	27,500	110,000	Terkait	3,068,025,450	3,068,025,450	3,068,025,450	3,068,025,450	12,272,101,800	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Minimnya pengetahuan ibu tentang Jampersal, gejala dan tanda persalinan serta persalinan yang aman dan masih ditemukannya status gizi balita dibawah garis	Meningkatnya tingkat kesehatan ibu dan anak	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1,000	Memfasilitasi Operasional Rumah Tunggu Kelahiran, makan dan minum pasien di rumah tunggu kelahiran, dan Transport Rujukan	Orang	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	0	150	150	200	500	Terkait	0	200,000,000	250,000,000	250,000,000	700,000,000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya Kesehatan bayi	Jumlah ibu hamil KEK dan balita kurang gizi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1.025 (Bumil) 2.206 (Balita)	Pemberian PMT dalam bentuk makanan jadi berbasis pangan lokal, diberikan kepada balita kurang gizi dan Ibu hamil Kekurangan Energi Korenik (KEK) 1 kali makan selama 90 hr makan melalui Tenaga Pengelola PMT yang ditunjuk (kader posyandu atau PKK desa atau tenaga lainnya)	Orang	Jumlah ibu hamil KEK dan balita kurang gizi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	0 Bumil 0 (Balita)	300 Bumil 600 (Balita)	300 Bumil 800 (Balita)	425 Bumil 806 (Balita)	1.025 Bumil 2.206 (Balita)	Terkait	0	1,000,000,000	2,000,000,000	2,298,203,955	5,298,203,955	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Masih banyaknya Lanjut Usia Terantar (seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih) yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya	terjaminnya kualitas hidup lanjut usia terantar dan disabilitas	Jumlah Lansia Terantar yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	100	Pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Jumlah Lansia Terantar yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	25	25	25	25	100	Terkait	11,249,927	11,249,927	11,249,927	11,249,927	44,999,708	Dinas Sosial, PMD	Dinas Sosial, PMD
				Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu	23	Penyediaan alat bantu dan alat bantu peraga	Orang	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu	0	0	0	23	23	Terkait				29,700,000	29,700,000	Dinas Sosial, PMD	Dinas Sosial, PMD
		Jumlah penyandang disabilitas mental yang mendapatkan layanan kesehatan	10	Pemberian akses layanan kesehatan	Orang	Jumlah penyandang disabilitas mental yang mendapatkan layanan kesehatan	10	10	10	10	40	Terkait	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	50,000,000	Dinas Sosial, PMD	Dinas Sosial, PMD		
	Masih banyak penduduk miskin yang belum tercakup dalam sistem jaminan kesehatan	Tersalurkannya bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang tepat sasaran	Jumlah penduduk miskin yang dilakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan iuran	203,405	Verifikasi dan validasi kelayakan data Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional	Orang	Jumlah penduduk miskin yang dilakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan iuran	0	0	0	203,405	203,405	Terkait				306,293,157	306,293,157	Dinas Sosial, PMD	Dinas Sosial, PMD	

No	Tema	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholders utama)	Jumlah Anggaran					Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Koordinator	Pelaksana
		Data penduduk miskin masih belum akurat	Penduduk miskin dan orang tidak mampu	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	232,831	Verifikasi dan validasi kelayakan usulan data penduduk miskin	Orang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	232,831	232,831	232,831	232,831	931,324	Terkait	39,999,982	39,999,982	39,999,982	39,999,982	159,999,928	Dinas Sosial, PMD	Dinas Sosial, PMD
		Masih terdapat indikasi program pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran	Penduduk miskin dan orang tidak mampu	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	56,013	Pengelolaan data fakir miskin	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	56,013	56,013	56,013	56,013	224,052	Terkait	3,749,962	3,749,962	3,749,962	3,749,963	14,999,849	Dinas Sosial, PMD	Dinas Sosial, PMD
				Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3,639	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3,639	3,639	3,639	3,639	14,556	Terkait	156,499,907	156,499,907	156,499,907	156,499,910	625,999,631	Dinas Sosial, PMD	Dinas Sosial, PMD
		Minimnya keberdayaan penduduk miskin dalam menjalankan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota				10	10	Terkait				9,999,931	9,999,931	Dinas Sosial, PMD	Dinas Sosial, PMD
		Masih terdapat Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap Air Minum Layak	Terpenuninya akses air minum yang standar atau layak	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan penambahan sambungan rumah melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	1,257	Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Air Minum Layak berupa Sambungan Rumah (SR) untuk tiap Rumah Tangga	Rumah tangga	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan penambahan sambungan rumah melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu			1,257	1,257	1,257	Terkait				9,920,620,216	9,920,620,216	Dinas Perkim-LH	Dinas Perkim-LH
		Masih terdapat Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap Sanitasi Layak	Meningkatnya sanitasi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	827	Penyaluran Dana DAK melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai pelaksana pembangunan	Rumah tangga	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	0	0	237	590	827	Terkait			1,688,625,000	5,065,875,000	6,754,500,000	Dinas Perkim-LH	Dinas Perkim-LH
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah tidak layak huni yang berhasil dilakukan peningkatan kualitas Rumah/direnovasi	9	Melakukan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat tidak mampu(pra sejahtera) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Rumah	Jumlah rumah tidak layak huni yang dilakukan peningkatan kualitas Rumah/direnovasi			9	9	9	Terkait				201,568,960	201,568,960	Dinas Perkim-LH	Dinas Perkim-LH
		Masih rendahnya jumlah penduduk usia kerja yang memiliki keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	32	Meningkatkan kualitas Tenaga Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			16	16	32	Terkait			241,436,908	241,436,908	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Tema	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholders utama)	Jumlah Anggaran					Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Koordinator	Pelaksana
		Belum memiliki ruang pelayanan yang memadai dan Petugas layanan belum memiliki kompetensi yang memadai membutuhkan program perluasan kesempatan kerja masih cukup banyak yang belum difasilitasi	Meningkatnya SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Persentase Angkatan Kerja yang Diberdayakan Melalui Perluasan Kesempatan Kerja	5	Meningkatkan SDM Pelayanan antar Kerja Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	Jumlah Angkatan Kerja yang Mendapatkan Layanan Antar Kerja			5		5	Terkait			23,288,760		23,288,760	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah pemohon sebagai penerima manfaat yang membutuhkan program perluasan kesempatan kerja masih cukup banyak yang belum difasilitasi	Terlaksananya Tenaga Kerja yang akan Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	25	Penempatan Tenaga Kerja melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Layanan AKAD dan AKL			25		25	Terkait			10,147,664		10,147,664	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah pemohon sebagai penerima manfaat yang membutuhkan program perluasan kesempatan kerja masih cukup banyak yang belum difasilitasi	terlaksananya Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	25	Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan				25	25	Terkait			10,147,664		10,147,664	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah pemohon sebagai penerima manfaat yang membutuhkan program perluasan kesempatan kerja masih cukup banyak yang belum difasilitasi	Terlaksananya Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	5	Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD			5		5	Terkait			38,333,520		38,333,520	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Belum memiliki ruang pelayanan yang memadai dan Petugas layanan belum memiliki kompetensi yang memadai membutuhkan program perluasan kesempatan kerja masih cukup banyak yang belum difasilitasi	Terlaksananya Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20				20	Terkait			288,759,344		288,759,344	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Masih banyak Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang belum mendapatkan manfaat program pemberdayaan	PMI (Pra dan Purna Penempatan)	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang diberdayakan	20	Peningkatan kompetensi dan layanan perlindungan bagi PMI (Pra dan Purna Penempatan)	Orang	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang diberdayakan			50		50	Terkait			122,259,344		122,259,344	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Persentase Angkatan Kerja yang Diberdayakan Melalui Perluasan Kesempatan Kerja	50	CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang	Jumlah PMI yang Mendapatkan Layanan Pelindungan Pra dan Purna Penempatan				50	50	Terkait		90,401,400		90,401,400	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			PMI Purna yang Diberdayakan	Jumlah PMI yang Mendapatkan Layanan Pelindungan Pra dan Purna Penempatan	10	PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	Jumlah PMI yang Mendapatkan Layanan Pelindungan Pra dan Purna Penempatan		10			10	Terkait		288,759,344		288,759,344	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Tema	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama)	Jumlah Anggaran					Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Koordinator	Pelaksana
			Tercapainya Tenaga Kerja yang mendapat jaminan sosial	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	400	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	400				400	Terkait	60,949,147				60,949,147	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Meningkatnya infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan pada satuan	Kelompok usaha transmigrasi yang diberi pelatihan usaha ekonomi produktif	2	Pemberdayaan warga transmigrasi melalui pelatihan usaha ekonomi produktif	Satuan Permukiman	Kelompok usaha transmigrasi yang diberi pelatihan usaha ekonomi produktif		2			2	Terkait		139,999,574			139,999,574	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Komoditi yang dibudidayakan/dikembangkan belum familiar di masyarakat/rumah tangga	Meningkatnya kemampuan kelompok Tani	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang mendapatkan pendampingan teknis dalam pemanfaatan pekarangan rumah	10	Pelatihan dan Pembinaan pada Kelompok Wanita Tani di Pekarangan Rumah	KWT	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang mendapatkan pendampingan teknis dalam pemanfaatan pekarangan rumah		5	5		10	Terkait			1,355,000,000		1,355,000,000	Dinas Pertanian dan KP	Dinas Pertanian dan KP
			Ketersediaan Cadangan Pangan Kabupaten	Jumlah Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten	18,500	Ketersediaan cadangan pangan pemerintah dalam penanganan bencana alam	Kg	Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten yang tersedia	18,500				18,500	Terkait				15,861,000	15,861,000	Dinas Pertanian dan KP	Dinas Pertanian dan KP
		Pemanfaatan lahan perkarangan dan demplot sudah dilaksanakan namun pemanfaatan hasil sayur dan buah untuk konsumsi rumah tangga belum menjadi pola hidup yang rutin dilaksanakan di dalam rumah	Terlaksananya Pekarangan Pangan Lestari	Jumlah KWT yang memanfaatkan Pekarangan Pangan Lestari	5	Peningkatan keterampilan dan pengelolaan pekarangan rumah tangga	KWT	Jumlah Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten		2	3		5	Terkait		120,000,000	180,000,000		300,000,000	Dinas Pertanian dan KP	Dinas Pertanian dan KP
		Masih banyaknya penyaluran bantuan pemerintah yang masih belum tepat sasaran	Tersalurkannya bantuan bagi sesuai sasaran	Jumlah peternak yang mendapatkan bantuan	2	Memberikan bantuan berupa kandang kambing kepada peternak di Kabupaten Sambas	Kelompok tani	Jumlah peternak yang mendapatkan bantuan			2		2	Terkait			45,000,000		45,000,000	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH
				Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan	3	Memberikan bantuan ternak (sapi, kambing, ayam dan itik) kepada peternak di Kabupaten Sambas	Kelompok tani	Jumlah peternak yang mendapatkan bantuan			3		3	Terkait			179,000,000		179,000,000	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH
				Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana perikanan	529	Memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana perikanan tangkap (alat tangkap ikan, kapal motor, perahu dan mesin) kepada masyarakat nelayan kecil di Kabupaten Sambas	orang	Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana perikanan			529		529	Terkait		3,196,000,000			3,196,000,000	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH
				Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan bantuan asuransi	223	Memberikan bantuan berupa asuransi kepada masyarakat nelayan kecil di Kabupaten Sambas	Orang	Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan bantuan asuransi			223		223	Terkait		44,956,800			44,956,800	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH
				Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan Paket Germarikan	1,370	Memberikan bantuan berupa Paket Germarikan (Gemar Makan Ikan) dalam rangka pencegahan stunting kepada masyarakat di Kabupaten Sambas	Orang	Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan Paket Germarikan			1,370		1,370	Terkait		198,650,000			198,650,000	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH

No	Tema	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholders utama)	Jumlah Anggaran					Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Koordinator	Pelaksana
				Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan bantuan berupa prasarana pemasaran ikan	97	Memberikan bantuan berupa prasarana pemasaran ikan kepada masyarakat nelayan kecil di Kabupaten Sambas	Orang	Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan bantuan berupa prasarana pemasaran ikan				97	97	Terkait				145,000,000	145,000,000	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH
				Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana pengolahan ikan	89	Memberikan bantuan berupa sarana pengolahan ikan kepada masyarakat pengolahan ikan di Kabupaten Sambas	Orang	Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana pengolahan ikan				89	89	Terkait				145,000,000	145,000,000	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH
				Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan	19	Memberikan Bantuan bagi pembudidaya ikan berupa sarana dan prasarana budidaya ikan dalam rangka memenuhi kebutuhan protein keluarga dan meningkatkan perekonomian keluarga	kelompok	Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan		11	8		19	Terkait		477,000,000	219,562,726		696,562,726	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH
				Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan	4	Memberikan bantuan berupa pembangunan kolam percontohan, pembangunan saluran tambak dan rehabilitasi tambak tradisional kepada pembudidaya ikan kecil di Kabupaten Sambas	kelompok	Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan			4		4	Terkait		672,000,000			672,000,000	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH
				Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan	19	Memberikan bantuan berupa sarana kolam terpal dalam rangka pencegahan stunting kepada pembudidaya ikan kecil di Kabupaten Sambas	kelompok	Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan		10	9		19	Terkait		207,205,263	186,484,737		393,690,000	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH
			Meningkatnya kualitas keluarga	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1,044	Memberikan Bantuan bagi masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk melakukan pemasangan atau Pencabutan KB MKJP	Akseptor	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	261	261	261	261	1,044	Terkait		121,484,000	121,484,000	255,439,000	498,407,000	DP3AP2KB	DP3AP2KB
	Kemampuan manajerial pengelola koperasi masih rendah	Meningkatnya perkembangan koperasi sehat.	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/Kota	14	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/Kota	unit usaha	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi.	3	4	4	3	14	Terkait			66,366,680		66,366,680	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
			Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan.	10	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	unit usaha	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan.	2	3	3	2	10	Terkait			34,330,080		34,330,080	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	110	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	orang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30	30	30	20	110	Terkait		530,387,000		530,387,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan		

No	Tema	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholders utama)	Jumlah Anggaran					Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Koordinator	Pelaksana	
		Terbatasnya informasi jaringan pemasaran, akses permodalan dan masih lemahnya jaringan distribusi pemasaran produk.	Meningkatnya Jumlah Usaha yang produktif	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi.	60	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi.	unit usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi.	15	15	15	15	60	Terkait			449,798,000		449,798,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
		Kemampuan manajerial pengelola usaha mikro yang masih rendah	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah data potensi dan pengembangan usaha mikro	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dokumen					1	1	Tidak terkait			280,000,000		280,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
				Jumlah Unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	223	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	unit usaha						223	223	Terkait			673,671,800		673,671,800	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
				Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	orang	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi.		10	10	15	15	50	Tidak terkait			263,780,000		263,780,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
				Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	30	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit usaha	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				30	30	30	Terkait			305,000,000		305,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
				Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	70	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha Mikro	orang	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				35	35	70	Terkait			210,185,000		210,185,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
				Masih rendahnya pengetahuan pengusaha/pedagang tentang mekanisme dan peraturan perundang-undangan terkait ekspor.	Meningkatkan Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	40	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	10	10	10	10	40	Terkait			60,007,312		60,007,312	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Terbatasnya ketersediaan informasi komoditi perdagangan yang berpotensi untuk diekspor.	Meningkatnya pertumbuhan industri	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				10	10	Terkait		162,368,687		162,368,687	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan		

No	Tema	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama)	Jumlah Anggaran					Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Koordinator	Pelaksana
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1	1	Tidak terkait				128,963,036	128,963,036	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1	1	Tidak terkait				586,821,000	586,821,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1	1	Tidak terkait				709,240,724	709,240,724	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
				Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1	1	Tidak terkait	-			90,000,000	90,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kabupaten/Kota	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kabupaten/Kota				1	1	Tidak terkait				25,000,000	25,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
				Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam Penyampaian Data ke SIINas				1	1	Tidak terkait				20,000,000	20,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Faktor Luasnya wilayah Kabupaten Sambas sehingga masih perlu adanya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Ketersediaan dan Kelayakan Infrastruktur Jalan dan Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	50,000	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Pembebasan Lahan	M ²	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	130,000	12,000	13,000	12,000	167,000	Terkait			175,000,000	175,000,000	Dinas PU dan PR	Dinas PU dan PR	
					35.18	Pembangunan Jalan	Km	Panjang Jalan yang dibangun	7.50	8.80	9.44	9.44	35.18	Terkait	16,882,779,684	16,716,954,684	29,169,517,843	22,610,662,891	85,379,915,102	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang

No	Tema	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan akat* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama)	Jumlah Anggaran					Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Koordinator	Pelaksana
					13.33	Rehabilitasi Jalan	Km	Panjang Jalan yang direhabilitasi	2.33	2.94	3.50	4.56	13.33	Terkait	358,429,390	369,429,390	20,700,868,531	15,539,838,599	36,968,565,910	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
					2	Pemeliharaan Berkala Jalan	Km	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	0.50	0.50	0.50	0.50	2	Terkait	887,499,906	604,166,573	947,499,906	380,833,274	2,819,999,659	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
					3	Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0.75	0.75	0.75	0.75	3	Terkait	305,685,654	255,085,884	485,077,666	15,900,000	1,061,749,204	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
					335	Pembangunan Jembatan	M	Panjang Jembatan yang dibangun	30	70	85	150	335	Terkait	2,476,349,484	2,676,349,484	4,165,769,584	2,722,644,281	12,041,112,833	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
					64	Rehabilitasi Jembatan	M	Panjang Jembatan yang direhabilitasi	5	15	20	24	64	Terkait	103,749,908	143,749,908	167,749,908	127,073,935	542,323,659	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
2	Peningkatan Investasi	Minat investasi di daerah masih belum optimal	Meningkatkan jumlah investor yang berinvestasi di daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	8	Mengikuti event promosi investasi tingkat Nasional dan Propinsi	Investor	Jumlah Investor yang berinvestasi di daerah	2	2	2	2	8	Terkait	75,336,610.25	75,336,610.25	75,336,610.25	75,336,610.25	301,346,441	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					1	Penyajian data / informasi potensi dan peluang investasi secara digital	Peta	Jumlah Peta Potensi Investasi digital				1	1					68,086,212	68,086,212	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Belum optimalnya peningkatan nilai realisasi investasi	peningkatan peyerapan tenaga kerja dan peningkatan perekonomian daerah	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	10	Optimalisasi Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek terkait LKPM	Persentase	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi	2	2	3	3	10	Terkait	120,667,430	120,667,430	120,667,430	120,667,430	482,669,718	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1	1	1	1	4	Terkait	16,306,100	29,973,900	16,329,450	12,390,850	75,000,300	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
					4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penataan Ruang	1	1	1	1	4	Terkait	26,029,350	31,774,900	18,532,700	34,149,955	110,486,905	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penurunan Stunting)	Belum tersedianya sistem yang mampu memuat pelaporan data balita secara real time dan berdasarkan BNBA untuk menjadi acuan intervensi dalam pencegahan dan penurunan stunting Kab. Sambas	Aplikasi SIMPATI (Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi) Kabupaten Sumedang, yang akan direplikasi di Kab. Sambas	Dokumen Kerjasama untuk Replikasi Aplikasi	1	Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk replikasi aplikasi SIMPATI (Sistem Informasi Pencegahan Stunting terintegrasi)	Dokumen	Dokumen Kerjasama untuk Replikasi Aplikasi				1	1	Terkait				75,000,000	75,000,000	Bappeda	Bappeda
					4	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	laporan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga link portal data keluarga risiko stunting: https://portalpk22-pdn.bkkbn.go.id/ta-bulasi		2	2	4	Terkait		20,400,000	68,100,000	68,100,000	156,600,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB	

No	Tema	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama)	Jumlah Anggaran					Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Koordinator	Pelaksana
			Meningkatnya kualitas keluarga	Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	193	Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana	50	100	150	193	493	Terkait		152,000,000	91,200,000	60,800,000	304,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB
				Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana ((Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	19	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBP untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana	5	5	5	4	19	Terkait		21,392,633	23,390,000		44,782,633	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB
				Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5	5	5	4	19	Terkait		17,000,000			17,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB
				Terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	380	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	95	95	95	95	380	Terkait	50,000,000				50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	100	Kampanye Materindu	Orang	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya				100	100	Terkait	-	-	-	46,214,562	46,214,562	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Tema	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama)	Jumlah Anggaran					Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Koordinator	Pelaksana
4	Inflasi	Masih sering terjadinya kenaikan harga barang pokok penting di Kab. Sambas	Meningkatnya suply barang sesuai permintaan masyarakat di kab. Sambas	Jumlah Pengadaan bibit ternak	3	Memberikan bantuan ternak (sapi,kambing, dan itik) kepada peternak di Kabupaten Sambas	Kelompok tani	Jumlah peternak yang mendapatkan bantuan			3		3	Terkait			179,000,000		179,000,000	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH
		Masih kurangnya stok pangan atau barang pokok dan barang penting di Kab. Sambas	Meningkatnya produksi pangan dan ternak di Kab. Sambas	Jumlah Kegiatan peningkatan produksi pangan dan ternak di Kab. Sambas	1	Pengawasan dan Penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan			1	1		Tidak Terkait			14,823,729	14,823,729	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH	
					9	Penjaminan Peredaran Benih / Bibit Ternak	Petugas IB	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar			9	9		Tidak Terkait			20,754,500	20,754,500	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH	
					12	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	Jumlah laporan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	3	3	3	3	12	Tidak Terkait	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,523,840	58,023,840	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH
					11	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Paket	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang telah disediakan		7	4		11	Tidak Terkait		855,362,726	153,000,000		1,008,362,726	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH
		Masih kurangnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab. Sambas	Meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab. Sambas	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab. Sambas yang diadakan	10	Pengadaan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		5	5		10	Terkait		66,000,000		66,000,000	Dinas Pertanian dan KP	Dinas Pertanian dan KP	
		Masih kurangnya kapasitas produksi kelembagaan di Kab. Sambas	Jumlah kelembagaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas penyuluhan	Jumlah Kapasitas Produksi	19	kapasitas kelembagaan penyuluhan yang di fasilitasi	BPP	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang di terfasilitasi	3	6	6	4	19	Tidak Terkait	47,918,000	95,836,000	79,863,000	79,863,000	303,480,000	Dinas Pertanian dan KP	Dinas Pertanian dan KP
		Masih belum lancarnya distribusi barang pokok penting	Peningkatan Infrastruktur Perdagangan	Jumlah Pembangunan infrastruktur yang baik	3,000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Koa	Jumlah	Jumlah perlengkapan jalan kabupaten yang tersedia		1,000	1,000	1,000	300	Tidak Terkait	-	3,885,625,500	3,885,625,500	3,885,625,500	11,656,876,500	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
					33	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	unit	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara			26		26	Tidak Terkait			3,290,400,000		3,290,400,000	Dinas Pertanian dan KP	Dinas Pertanian dan KP
				unit			Jumlah Lantai Jemur yang dibangun			7	7	Tidak Terkait			342,300,000		342,300,000	Dinas Pertanian dan KP	Dinas Pertanian dan KP		
Masih belum lancarnya komunikasi dan informasi data	Meningkatkan Kualitas Data	Jumlah data dan informasi yang tersedia	5	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dokumen	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		1			1	Tidak Terkait		7,345,190		7,345,190	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Perikanan, Peternakan dan KH			

No	Tema	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama)	Jumlah Anggaran					Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Koordinator	Pelaksana
						Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B	Dokumen	Jumlah Dokumen Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B		1			1	Tidak Terkait		25,332,000	12,666,000	12,666,000	50,664,000	Dinas Pertanian dan KP	Dinas Pertanian dan KP
						Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1	1	Tidak Terkait			7,499,500	7,499,500	14,999,000	Dinas Pertanian dan KP	Dinas Pertanian dan KP
						Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	Jumlah Dokumen Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1	1	Tidak Terkait			10,087,000	10,087,000	20,174,000	Dinas Pertanian dan KP	Dinas Pertanian dan KP
						Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dokumen	Jumlah Dokumen Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1	1	Tidak Terkait			20,318,500	20,318,500	40,637,000	Dinas Pertanian dan KP	Dinas Pertanian dan KP
			Mengendalikan Ekspektasi Inflasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dalam Pengendalian Ekspektasi Inflasi	1	Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1	1	Tidak Terkait		50,000,000	120,000,000	157,669,000	327,669,000	Dinas Pertanian dan KP	Dinas Pertanian dan KP
		Faktor Luasnya wilayah Kabupaten Sambas sehingga jumlah pelaku usaha yang dijadikan responden untuk pengumpulan data harga belum bisa mewakili kondisi harga yang sebenarnya di Kabupaten Sambas	Meningkatkan stabilitas ketersediaan barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3	3	3	3	12	Tidak Terkait			74,955,033		74,955,033	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatkan stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kab. Sambas	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	3	3	3	12	Tidak Terkait			119,160,683		119,160,683	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatkan Stabilitas harga pupuk dan pertisida bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	3	3	3	3	12	Tidak Terkait			59,595,608		59,595,608	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

No	Tema	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama)	Jumlah Anggaran					Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Koordinator	Pelaksana	
		Pada saat stok barang berkurang atau saat banyaknya permintaannya, seperti saat perayaan agama harga barang penting atau kebutuhan rokok harga	Meningkatkan stabilitas stok barang di masyarakat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar		1		1	2	Terkait		348,626,956			348,626,956	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
			Meningkatkan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang diadakan		4	1		5	Terkait		1,137,216,142			1,137,216,142	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
				Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	35	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10	10	15		35	Terkait			329,336,792			329,336,792	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3	3	3	3	12	Tidak Terkait Langsung			305,664,450			305,664,450	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3	3	3	3	12	Tidak Terkait			129,385,610			129,385,610	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
				Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapannya dalam setahun penggunaannya bisa mengalami kerusakan, tidak sesuai standar	Meningkatkan kualitas perlengkapan sarana perdagangan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1,200	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah	Jumlah Alat Perdagangan yang ditera ulang	300	300	300	300	1,200	Terkait		188,925,925			188,925,925	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	10	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	orang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	2	3	2	3	10	Terkait		30,810,833			30,810,833	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan		
5	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Masih minimnya SDM di Kabupaten Sambas sehingga penyedia e-katalog banyak yang berasal dari luar sambas	Meningkatkannya Tata Kelola E-katalog Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen E-Katalog Kabupaten Sambas yang disusun	4	Penyusunan Dokumen Etalase lokal Kabupaten Sambas yang disusun: 1. SK Etalase produk preservasi jalan Kabupaten Sambas 2. SK Etalase produk Meubelera 3. SK Etalase produk aplikasi, perangkat lunak dan jaringan 4. SK Etalase produk perlengkapan kantor dan meubelair.	Dokumen		2		2	4	Tidak Terkait	40,950,970,000	40,950,970,000	40,950,970,000	40,950,970,000	163,803,880,000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
			Jumlah jenis etalase E-katalog lokal kabupaten	42	Jumlah jenis etalase E-katalog	Etalase	Jumlah jenis etalase E-katalog		42		42	42	Tidak terkait	21,999,999	21,999,999	21,999,999	21,999,999	87,999,996	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		

No	Tema	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama)	Jumlah Anggaran					Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Koordinator	Pelaksana
		Penggunaan Produk Dalam Negeri pada proses pengadaan barang dan jasa pada organisasi perangkat daerah yang masih belum sesuai target.	Meningkatnya pertumbuhan industri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Program Produk Dalam Negeri (P3DN)	1	Pelaksanaan Sosialisasi Program Produk Dalam Negeri ((P3DN) kepada KPA/PPK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas	Dokumen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Program Produk Dalam Negeri		1			1	Terkait		70,000,000			70,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ERWANTO S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO